

BERPOLITIK DALAM PERSPEKTIF IMAN KRISTEN

Dra. Tumini Sipayung, MA¹
Dr. Roma Sihombing, M.Th²

¹Dosen Politeknik Unggul LP3M Medan

²Dosen Sekolah Tinggi Theologia Injili Indonesia Medan

ABSTRACT

Carut-marut perpolitikan di Indonesia menyeret orang memberi penilaian bahwa politik itu kotor, jelek, tidak indah, mengkuatirkan, dan menjatuhkan. Tampaknya bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain, akibat tindakan-tindakan politik membawa kesengsaraan terhadap kelompok-kelompok sosial. Padahal setelah diteliti asal-muasal pengertian politik, didapati bahwa artinya penyadaran warga negara akan hak dan tanggungjawabnya. Kalau arti dan tujuan politik sejak awalnya maka telah terjadi pergeseran persepsi, justru politik itu indah, membangun, membangkitkan semangat, mengangkat harkat dan martabat, serta termaktub di dalamnya cita-cita ideal. Dalam tulisan ini akan dihadirkan terminologi politik, yang sejak awal ditemukan pengistilahannya di Yunani kuno. Para pakar akan membeberkannya sehingga akar kata Politik dapat dipahami dengan cerah. Untuk lebih jauh, politik dan cara berpolitik akan dikeker berdasarkan pikiran Alkitab, yang nantinya menghantar orang-orang Kristen tidak alergi kepada politik, apalagi sampai anti politik. Memang harus diakui, banyak orang Kristen terjun ke arena politik (baca : politik praktis), tapi melenceng dalam cita-cita dan niat, sehingga bukan membawa kemaslahatan bangsa tapi justru mudarat, yakni sesuatu yang merugikan banyak pihak. Kehadiran orang Kristen dalam perpolitikan merupakan panggilan untuk memperbaiki kehidupan sosial, moral, dan peradaban. Hal-hal tersebut sangat dekat dengan ranah kebijakan dan peraturan. Ranah kebijakan dan peraturan berada dalam keputusan politik. Keputusan politik yang tepat akan menghasilkan semangat sosial, perilaku moral yang seimbang, dan perbaikan peradaban. Politik, sejatinya tidak semata-mata ditujukan untuk perebutan tahta dalam arti sempit, tapi seharusnya terarah kepada komitmen menghadirkan kehidupan yang seimbang, perilaku toleran, tindakan keadilan, dan kesejahteraan bersama.

Kata kunci: *Politik, perspektif.*

PENDAHULUAN

Mencermati hubungan kekristenan dan politik melahirkan berbagai pemikiran. Terdapat ragam pendapat; beberapa kelompok berpendapat bahwa kekristenan mendukung langsung ideologi atau filsafat politik. Yang lainnya meyakini bahwa umat Kristen seharusnya tidak terlalu memiliki partisipasi atau minat dalam politik atau pemerintahan.

Michael Gerson dan Peter Wehner di dalam bukunya *City of Man: Religion and Politics in a New Era*, sebagaimana dikutip Rev Christian Tirtha¹ mengatakan bahwa ketegangan politik adalah kompleksitas yang tak terhindarkan. Terlebih lagi begitu agama masuk ke dalam ketegangan itu maka ada dua bahaya yang mungkin terjadi: agama menjadi kendaraan untuk mencapai maksud politis, atau agama sama sekali lepas tangan tanpa mencari kesempatan untuk bertindak apa-apa.

Gerson dan Wehner menutup bukunya dengan mengatakan², Politik adalah bagian dari tugas kita, tetapi bukan pengharapan kita. Terlibat dalam politik adalah panggilan yang

¹ <https://www.icc-melbourne.org/icc-blog/post/iman-kristen-dan-politik>

² Ibid

mulia, tetapi bukan tujuan akhir kita. Orang Kristen dapat berguna dalam kehidupan publik justru karena mereka mengakui adanya nilai-nilai kekekalan dan makna hidup di luar dunia politik. Kita bekerja demi kebaikan dan kesehatan sebuah kota duniawi. Kita berharap pada sebuah kota dimana tidak ada kematian, air mata, penderitaan, dan duka cita.

Kita tidak bisa menghindari dari keberadaan kebijaksanaan politik, entah itu baik atau pun buruk. Bagaimana pun juga kesejahteraan dan kebaikan masyarakat banyak masih sangat tergantung keputusan-keputusan politik. Tentu saja kepentingan ini sering dipelintir oleh sekelompok orang. Tetapi sebagai bagian dari masyarakat, gereja tidak seharusnya mengambil jarak, mencuci tangan, dan hanya kerjanya mengecam kebobrokan yang ada. Mendoakan, bersuara dengan bijaksana, mengulurkan pengampunan, berdialog, bekerja sama, membagikan kebenaran, mengkritisi dengan kepala dingin—semuanya adalah panggilan yang sah bagi setiap orang percaya. Dan bagi beberapa dari kita, mungkin bentuknya adalah terlibat, bekerja, dan berpartisipasi langsung di dalam pemerintahan dan/atau partai politik sekalipun.

Sampai Kristus datang kembali, setiap pengikut-Nya akan selalu hidup sebagai warga negara di dua kota—duniawi dan surgawi. Mari kita tunjukkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia, kewarganegaraan mana yang menjadi fokus utama kita!³

Latarbelakang Masalah

Orang Kristen berada di dunia, mereka berhadapan langsung dengan kehidupan sosial, pergulata ekonomi, dan keragaman yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan keputusan. Itu sebabnya Alkitab menyadarkan orang Kristen sebagai terang dan garam dunia. Mereka hadir di tengah kehidupan manusia yang tidak ideal, perebutan pengaruh dan tuntutan-tuntutan material.

Ada pendapat bahwa orang-orang Kristen dan gereja-gereja harus aktif berpolitik. Memang yang dimaksudkan bukan langsung berpolitik praktis, dalam arti menjadi anggota partai politik dan memperjuangkan aspirasi partai, melainkan menyorotoi dunia politik Indonesia dan mengambil sikap politik. Dalam pendapat ini diasumsikan bahwa pada masa lalu di era Orde Baru orang-orang Kristen dan gereja-gereja kurang ambil peduli terhadap politik. Akibatnya, kepentingan Kristen selalu dirugikan. Maka yang perlu dilakukan pada zaman sekarang, orang-orang Kristen dan gereja-gereja diminta untuk mengambil sikap baru, supaya dengan demikian kepentingan Kristen lebih diperjuangkan dengan hasil yang lebih baik.

Pengertian Politik

Kata “Politik” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengetahuan ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan), segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya), dan cara bertindak/bijaksana dalam menghadapi atau menangani suatu masalah.

Etimologi (asal mula) istilah politik berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani dari judul sebuah buku karya Aristoteles *Politics* (politika) yang berarti “urusan kota”.⁴ Istilah lainnya dalam bahasa Yunani (politikos) berarti “dari, oleh, dan untuk warga negara”, “sipil”, “kenegaraan”, serta bahasa Yunani (polis) yang berarti “kota”. Istilah politik memiliki akar kata polis yang artinya “kota” atau “negara”. Dari kata polis timbul kata polites, yang berarti “penduduk kota” atau “warga negara”. Kata kerja Yunani politeuomai berarti

³ Ibid

⁴ Hedi Sasrawan, <http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2015/01/asalmula-politik-artikel-lengkap.html>.

“memerintah atau mengatur negara”. Dari kata tersebut muncul derivatifnya, politike, yang berarti “tanggung jawab warga negara terhadap negaranya”. Pengertian mengenai tanggung jawab warga negara terhadap negaranya disebut politike episteme. Episteme secara harafiah berarti pengertian atau pengetahuan. Sedangkan cara-cara untuk menggalang kekuatan atau menghimpundungan dalam rangka menjalankan negara atau mempengaruhi jalannya negara disebut politikhe tekhne.

Dalam istilah yang terakhir inilah kata politik sering mendapatkan konotasi negatif, karena teknik berpolitik sering mengabaikan cara-cara yang digunakan untuk memperoleh dukungan.⁵ Berdasarkan arti kata dan etimologi politik, maka politik memiliki pengertian segala sesuatu tindakan/keputusan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat dan kota. Tujuan politik adalah untuk kepentingan masyarakat/warga negara dan untuk suatu kebaikan dan keadilan. Namun pada kenyataannya dan perkembangannya, tujuan politik mengalami perkembangan yang semakin meluas dan dapat berdampak negatif, tidak lagi memikirkan kepentingan masyarakat untuk tujuan suatu kebaikan dan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat/kota, melainkan politik sering digunakan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja (misalnya bertujuan hanya untuk kepentingan partai politik).

Politik adalah bagian dari etika yang berurusan dengan manusia dalam kegiatan kelompok. Manusia adalah makhluk-makhluk polis (kota-negara), dan secara alamiah kecenderungan manusia adalah membentuk kelompok, bertindak dalam kelompok dan secara berkelompok. Dengan demikian, maksud dan tujuan politik adalah untuk menggapai kesejahteraan bagi seluruh manusia dan kelompoknya.

Ada dua hal yang dapat dipahami dalam kegiatan berpolitik, yang *pertama*, sebagai bentuk kemampuan manusia untuk hidup bersama di dalam sebuah polis (kota-negara) di mana ia hidup dengan siapa pun. Dan dalam pengertian kedua, politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan politis. Dalam pengertian *kedua* ini, kepentingan-kepentingan pribadi sudah sangat mewarnai dan dalam hal inilah arti dan istilah politik mengalami penghambaran makna. Agama Kristen mengajarkan kehendak Allah dalam hal mengajar, mendidik, membina, menasihati dan menuntun warga gereja atau warga kristiani untuk mengenal Allah dan kehendakNya, menyatakan kasih, pengampunan, perdamaian, keadilan, kebenaran dalam mewujudkan Kerajaan Allah di tengah dunia.

Sebagaimana maksud dan tujuan Kristus dalam memproklamasikan pekerjaanNya di tengah dunia dan sesama manusia. Yesus menyatakan bahwa “Roh Tuhan ada padaKu, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk mem-beritakan tahun rahmat Tuhan telah datang” (band. Lukas 4:18-19; Yesaya 61:1-2; Matius 13:57; Markus 6:4; Yohanes 4:44). Politik bukanlah berlawanan dengan tujuan pendidikan Kristen, sebab pengertian dan penjabaran politik dapat ditemui dalam Alkitab sebagai wujud perintah Allah.

Plato dan Aristoteles mengatakan bahwa politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat (polis, kota) yang terbaik. Plato dan Aristoteles menyadari bahwa politik adalah alat atau cara yang dipakai untuk menciptakan kondisi masyarakat yang terbaik. Kondisi terbaik dimana tercapai kesejahteraan yang maksimal, kebebasan mengekspresikan hak-hak individu dalam tatanan moral masyarakat yang tertib dan beradab.

Rumusan Masalah

Bertolak dari latarbelakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya, yakni :

⁵ Bambang Subandrijo dan Tim, Agama dalam praksis, (Jakarta, BPK.Gunung Mulia, 2003), 146.

Pertama, Apa dasar munculnya dualisme pendapat di kalangan Kristen antara menerima dan menolak keberadaan politik.

Kedua, bagaimana peranan orang Kristen dalam perpolitikan nasional dan pemerintahan.

Ketiga, apa solusi atas adanya dualisme pendapat orang Kristen antara menerima dan menolak keberadaan politik.

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan merupakan suatu upaya menemukan jawaban atas pokok masalah penelitian. Oleh karena itu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

Pertama, untuk mengetahui dan mengerti tentang latarbelakang munculnya dualisme pendapat di kalangan Kristen yang menerima dan menolak politik.

Kedua, untuk memahami peranan orang Kristen dalam perpolitikan nasional dan pemerintahan.

Ketiga, untuk menemukan solusi atas adanya pendapat orang Kristen antara menerima dan menolak keberadaan politik.

Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang signifikan kepada para pembaca. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

Pertama, agar pembaca mendapat wawasan yang lebih luas tentang latarbelakang munculnya dualisme pendapat di kalangan Kristen yang menerima dan menolak politik.

Kedua, agar pembaca mendapat pemahaman yang semakin jelas peranan orang Kristen dalam perpolitikan nasional dan pemerintahan.

Ketiga, agar pembaca mengetahui solusi atas adanya pendapat orang Kristen antara menerima dan menolak keberadaan politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan riset kepustakaan. Penulis hanya memaksimalkan referensi data-data dan fakta-fakta dari Alkitab sebagai sumber utama, dan buku-buku yang bersangkutan-paut dengan perpolitikan Kristen serta karya-karya kekristenan dalam pentas politik nasional.

TEOLOGI DAN POLITIK

Abraham Silo Wilar dalam bukunya *Kristianitas & Politik Global*, sebagaimana dikutip dari *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*⁶ menjelaskan tentang teologi dan politik adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, kegiatan berteologi tak bisa dilakukan secara sembarangan. Perlu dilakukan pembimbingan dalam usaha berteologi yang melibatkan politik agar terjadi interaksi yang konstruktif. Sebuah teologi politik yang membangun dan memberdayakan, bukan teologi yang menebar ketakutan dan teror. Sejak awal politik ditujukan untuk membangun kehidupan, bukan mematahkan, apalagi mematikan.

Pembimbingan politik diartikan sebagai batasan-batasan, mana yang bisa dan mana yang tidak. Semuanya harus terukur berdasarkan kebenaran alkitabiah. Dalil biblical harus

⁶ “Kristianitas & Politik Global Suatu Tinjauan Atas Konstruksi Teologi-Politik Tokoh-Tokoh Kristen Di Jerman Dan Lebanon,” 14, dikutip dari *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019

menjadi acuan absolut, sehingga tidak bermain api dunia, yang bisa membakar siapa saja. Kehadiran politik Kristen harus membawa kesejukan, motivasi, menghadirkan kesadaran alamiah dan ketuhanan.

Etika Berpolitik Kristen

Politik adalah bagian dari etika yang berurusan dengan manusia dalam kegiatan kelompok. Manusia adalah makhluk-makhluk polis (kota-negara), dan secara alamiah kecenderungan manusia adalah membentuk kelompok, bertindak dalam kelompok dan secara berkelompok. Dengan demikian, maksud dan tujuan politik adalah untuk menggapai kesejahteraan bagi seluruh manusia dan kelompoknya

Zakharia Ngelow, mengungkapkan, bahwa dalam pelayanan politik gereja, bukan terutama supaya orang-orang Kristen berkuasa di berbagai posisi penting untuk memuluskan kepentingan orang Kristen atau kepentingan gereja, melainkan supaya orang-orang yang baik, profesional dan berintegritas, dari berbagai latar belakang agama, Kristen atau bukan Kristen, bersamasama melayani kepentingan seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan. Politik Kristen bukan politik kekuasaan dan kepentingan, melainkan politik pelayanan dan keadilan bagi seluruh warga masyarakat bangsa kita.⁷ Politik Kristen hadir dan tampil untuk mengisi kesejahteraan dan kebaikan bersama. Itu berarti politik Kristen memberi faedah masa kini dan masa depan.

Orang Kristen perlu untuk bersikap politis seperti halnya Yesus sendiri yang bersikap politis. Dalam keterlibatan-Nya dengan dunia dalam sejarah manusia, Allah yang menjelma dalam diri Yesus tidak bersikap netral, melainkan melakukan suatu *affirmative action* yang nyata, dengan memihak manusia yang lemah dan berdosa, agar mereka diselamatkan melalui penebusan. Pilihan tersebut menyangkut nasib orang banyak yang hendak dibela, sehingga dengan jelas dapat dinyatakan bahwa Allah itu politis.⁸ Ke-politis-an Allah untuk mengangkat keterpurukan manusia dari dosa dan kebinasaan. Berarti politik ala Kristus adalah politik surgawi yang berakar di dunia.

Politik Sebagai Jalan Kesucian

Kesadaran akan politik sebagai jalan kesucian didasari pada keyakinan bahwa semua anggota gereja (pengikut Kristus) dipanggil dan diundang mengikut Yesus untuk mewujudkan keselamatan. Keselamatan yang dilakukan Yesus bukan hanya terjadi pada kehidupan kelak setelah kematian atau menyangkut eskatologi, tetapi juga meliputi apa yang sudah diwujudkan di dalam dunia ini.⁹ Dunia sebagai ladang praktek politik yang menunjukkan kebajikan, kesalehan, kepedulian, dan komimen kekudusan.

Keterlibatan umat beriman dalam setiap pekerjaan dan aspek dalam dunia ini, termasuk politik, merupakan medan untuk mewujudkan iman akan keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Keselamatan yang diwartakan Yesus adalah sebuah keselamatan yang integral. Keselamatan itu menyangkut seluruh dimensi kehidupan manusia dan menjangkau semua orang. Dengan demikian, iman tidak boleh direduksi pada ajaran abstrak (dogmatikadoktrinal) saja, melainkan juga perlu mendapat pengungkapan nyata untuk menyapa manusia dalam segala dimensi kehidupannya.

⁷ Ngelow and Ngelow, "Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia," 224., Ibid. 32

⁸ Eddy Kristiyanto, *Sakramen Politik: Mempertanggungjawabkan Memoria* (Yogyakarta: Lamalera, 2008), xi., Ibid 33.

⁹ 26 Paulinus Yan Olla, *Spiritualitas Politik: Kesucian Politik Dalam Perspektif Kristiani* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 68. Ibid.

Oleh karena manusia telah dikasihi Allah, maka orang beriman terpancung untuk menanggapi kasih itu. Orang beriman harus mewujudkan kasih Allah itu dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam dunia politik. Dalam rangka keterlibatan gereja atau orang Kristen dalam dunia politik praktis, gereja atau orang Kristen harus memiliki prinsip-prinsip yang perlu dipegang agar supaya tidak terlena dalam kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Politik Kristen adalah politik kasih. Kasih itu sendirilah yang berpolitik, sehingga dapat dirasakan dan dinikmati seluruh makhluk.

Yewangoe, memberi prinsip-prinsip politik kekristenan, sebagaimana diringkas, bahwa :¹⁰

1) Kekuasaan yang dimiliki adalah kekuasaan yang melayani, bukan kekuasaan demi kekuasaan;

2) Yang diperjuangkan adalah kesejahteraan bersama, bukan sekedar kesejahteraan sendiri yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan salah paham di dalam masyarakat.;

3) Dalam penyelenggaraan kekuasaan, mestinya etika dan moral kekuasaan dikedepankan. Perlu ada keseimbangan antara kekuasaan (power), keadilan (justice), dan kasih (love).

4) Dengarkanlah selalu suara hati yang benar. Kompromi politik mungkin tidak terhindarkan tapi ada batasnya. Apabila kompromikompromi itu telah menyentuh hal yang paling prinsip dalam iman Kristen, maka “adalah lebih baik taat kepada Allah ketimbang kepada manusia” (Kis. 5:29); 5) Gereja tidak boleh berhenti menjalankan fungsi atau pelayanan pastoralnya terhadap anggota atau umatnya yang berkecimpung dalam dunia politik (praktis).

6) Lebih daripada itu, gereja tidak boleh mengidentikkan diri dengan atau sebagai partai politik. Gereja adalah suatu institusi yang mengatasi semua partai politik. Dalam “pengambilan jarak” yang demikian, maka gereja memiliki kekuatan moral.

Prinsip-prinsip tersebut dipraktekkan dalam kehidupan sosial secara luas, bukan hanya di arena gereja dan kekristenan. Jelaslah bahwa pelayanan politik adalah sesuatu yang dapat dikerjakan oleh gereja (orang Kristen). Tetapi perlu diingat bahwa pelayanan politik tersebut bukan untuk memperjuangkan “kepentingan Kristen” semata melainkan sebuah pelayanan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Money politics secara teologis adalah dosa. Perlu dipikirkan, saat seorang pemimpin keagamaan terjun dalam politik praktis, maka konsekuensinya akan cukup berat sebab ia akan kesulitan menghadirkan pesan profetik bagi semua. Sukar baginya untuk bersikap netral dan tidak memihak.

KEKRISTENAN MENGAJARKAN POLITIK

Akan terjawab bahwa kekristenan tidak menjauhi dan menghindari politik. Politik merupakan jalan yang dipersiapkan Allah untuk menyadarkan masyarakat akan hak dan tanggungjawabnya. Politik harus menjadi jembatan membangun masa depan yang lebih cerah. Itu sebabnya dasar perpolitikan Kristen adalah kebenaran, kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Daud telah berpolitik untuk kemasyuran Allah, Daniel telah berpolitik untuk kecemerlangan nama Yehova di Babel, Ester telah berpolitik untuk keselamatan nyawa umat Tuhan (Israel).

Politik Mengusahakan Kesejahteraan Bangsa

¹⁰ Andreas A. Yewangoe, Tidak Ada Penumpang Gelap: Warga Gereja, Warga Bangsa (Jakarta: Biro Penelitian dan Komunikasi PGI & BPK Gunung Mulia, 2009) 224-225, Ibid.

Dalam Alkitab, Tuhan memberi perintah kepada umat Israel yang saat itu dibuang ke Babel untuk mengusahakan kesejahteraan kota dimana mereka berada. Yeremia 29: 11 “Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu”. Perintah Tuhan jelas, usahakanlah kesejahteraan kota atau polis. Dan saat itu, kota yang sedang ditujukan adalah kota Babel, yang sarat dengan penyembahan berhala dan sadis. Kota tersebut tidak memberi peluang kehidupan dan kesejahteraan terhadap bangsa Yehuda yang diperbudak.

Masa kini, tugas gereja adalah koinonia, marturia dan diakonia, hal ini bertitik tolak dari perintah Tuhan. Proses pembelajaran mengenai koinonia (kehidupan persekutuan komunitas iman) yang di dalamnya memiliki nilai-nilai kehidupan personal dan sosial dimana satu sama lain saling berproses “membagi hidup” dalam konteks bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tatanan masyarakat majemuk memberikan pencerahan agar manusia menghormati kehidupan personal dan sosial dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk (berbeda latar belakang kehidupan, budaya, agama, suku, bahasa, dll).

Pengajaran Kristen dalam kehidupan masyarakat majemuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman atas salah satu aktivitas masyarakat majemuk dalam menjalani kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yaitu dalam hal aktivitas politik atau kegiatan proses berpolitik.

Komunitas orang percaya Kristus dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran yang berdasarkan iman Kristen pada proses berpolitik. Hal ini penting mengingat bahwa sebenarnya lokus teologi yang lebih langsung berhubungan/berkaitan dengan politik adalah aspek persekutuan, yang dikenal dengan koinonia. Komunitas orang percaya seharusnya dapat memperlihatkan bagaimana orang percaya harus hidup bersama di tengah masyarakat majemuk sebagai pengikut Kristus.

Politik Yang Menghindari Radikalisme

Pengajaran alkitabiah dalam masyarakat majemuk diharapkan dapat mencegah politisasi agama dan dapat menjauhkan radikalisme atau fundamentalisme agama dari permainan politik. Radikalisme atau fundamentalisme agama dari permainan politik beresiko dapat menggoyahkan fragmentasi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, bahkan kontraproduktif dengan cita-cita membangun tatanan kehidupan demokratis yang didasarkan pada pluralisme/kemajemukan dan kesetaraan.

Menurut Isidorus Lilijawa dalam bukunya *Mengapa Takut Berpolitik ?* Dia menjelaskan Tujuan politik adalah menyelenggarakan *bonum commune* (kepentingan umum, kesejahteraan bersama) yang berarti memfasilitasi manusia untuk mengusahakan apa yang dibutuhkannya untuk hidup layak secara manusiawi. Hidup layak manusiawi berarti kemudahan untuk memenuhi kebutuhan wajar untuk dapat hidup yang sesuai dengan martabat pribadi manusia. Ini tidak saja diukur menurut pemenuhan kebutuhan pokok melainkan kebutuhan untuk berkembang lebih lanjut. Memenuhi kebutuhan berarti dapat memenuhi hak-haknya yang asasi, karena berbagai kebutuhan adalah mutlak; artinya harus dipenuhi, kalau tidak akan timbul gangguan berat dan bahkan kematian. Hidup ini sesuai dengan martabat manusia tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan, apalagi sesaat, tetapi juga segala yang perlu atau bermanfaat untuk berkembang.¹¹ Dalam politik yang benar, kebutuhan itu tercapai, walaupun mungkin bertahap.

Kenyataan yang terjadi saat ini tujuan politik belum seutuhnya dirasakan oleh masyarakat. Khususnya masyarakat di Indonesia, kita melihat masih banyak kasus pejabat

¹¹ Isidorus Lilijawa, *Mengapa takut berpolitik ?* (Yogyakarta, Yayasan Pustaka Nusatama, 2007), 39-40

negara menggunakan uang rakyat hanya untuk memfasilitasi kepentingan pribadi mereka saja. Lebih jelasnya dikatakan oleh Isidorus bahwa tujuan politik yang mulia dan luhur tidak sepenuhnya teraktualisasi dalam ke-hidupan nyata setiap hari. Bahkan seringkali tujuan mulia itu mengalami pembiasaan dalam praktik.

Hal ini sangat disebabkan oleh berbagai hal seperti hilangnya roh etis dalam tubuh politik sehingga para politisi bertindak tanpa kontrol etika dan moral. Redupnya fajar nurani oleh „nafsu“ merebut kekuasaan dan mempertahankan pun dengan cara-cara tidak halal memperparah proses pembiasaan itu. Akibatnya, upaya bonum commune yang dicita-citakan bersama justru menjadi penderitaan yang ditimpakan kepada rakyat kecil, prinsip bonum commune berubah menjadi bonum individuum (kepentingan pribadi).

Politik yang penuh dengan kecenderungan destruktif akan melahirkan penindasan dan belenggu bagi banyak orang. Dalam konteks itu, gereja terpanggil untuk ikut serta dalam usaha pelayanan/pembebasan yang dilakukan Allah (Lukas 4, Matius 25). Gereja perlu melayani mereka yang menjadi korban permainan politik. Gereja terpanggil dan perlu berbicara dan bersaksi tentang kebaikan Allah bagi semua manusia. Gereja perlu berbicara tentang kerajaan Allah, pemerintahan Allah, yang mengatasi kekuasaan dan pemerintahan manusia. Kasus kehadiran orang Israel dalam pembuangan di Babel dan pesan nabi Yeremia kepada mereka agar mengusahakan kesejahteraan kota dimana mereka pergi adalah contoh kesaksian di bidang politik (Yeremia 29:1-7).

Para nabi dalam Perjanjian Lama dan Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru selalu melakukan koreksi terhadap dosa para pemimpin politik. Tugas koreksi ini dapat dilakukan kalau gereja sendiri mampu memperlihatkan sikap hidup yang baik dan benar. Maka tujuan korektif ini dapat diartikan sebagai tujuan pastoral atau tujuan pengembalaan. Penekanannya memang harus pada segi pastoral. Tujuan pastoral adalah menimbulkan kesadaran akan kasih Allah bagi mereka yang ingin berubah dan menyesali kesalahannya. Misalnya yang dilakukan nabi Natan pada Raja Daud (2 Samuel 12). Atas peran pastoral nabi Natan, Daud mengalami kesadaran yang mendalam atas dosa dan kejahatannya, sehingga dia sesegera mungkin bertobat dan berubah. Ketiadaan pastoral dari nabi Natan akan menjadikan Israel jatuh lebih dalam kepada kekejian.

Politik Yang Mewujudkan Kasih

Kasih harus menjadi kata kunci perpolitikan Kristen. Politik itu menegakkan keadilan dan mewujudkan kasih. Iman Kristen mengakui bahwa segala kuasa ada di tangan Kristus, maka kuasa apapun di dunia ini harusnya mengacu pada kekuasaan Kristus. Maka kekuasaan politik harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan cinta kasih. Dengan kata lain, tujuan keterlibatan gereja dalam politik agar “manusia taat kepada Allah, daripada kepada manusia” (Kisah Rasul 5:29).

Berpolitik yang benar, berarti mendidik warga gereja supaya peduli dan paham mengenai tugas panggilannya di dunia. Gereja ada di dalam dunia dan di utus ke dalam dunia (Yohanes 17) dan terpanggil untuk menjadi garam dan terang dunia (Matius 5:13-16). Gereja dan warga gereja adalah warga kerajaan soraga yang ada dan hadir di dunia untuk mewujudkan tandatanda kerajaan Allah. Keterlibatan dalam politik sekaligus berfungsi sebagai pendidikan politik bagi warga gereja. Hal yang paling pokok adalah inti makna politis yang menjadi bingkai terhadap hal-hal yang disebut di atas adalah Kerajaan Allah yang universal.

Makna universal itu menempatkan gereja-gereja dalam keharusan yang terus-menerus untuk memasuki segala ruang dan lorong. Keyakinan utama yang harus dikembangkan adalah bahwa tidak ada ruang yang tertutup bagi gereja untuk menyampaikan keselamatan dari

Tuhan, tidak ada budaya yang terlarang dimasuki dan tidak ada batas-batas teritorial berdasarkan etnis, bangsa maupun politis.

Makna persekutuan menjadi begitu mendalam dalam konteks politik alkitabiah dan universalitas Kerajaan Allah itu. Koinonia yang memiliki kesejajarannya dengan polis memperoleh maknanya yang utuh, ketika batas-batas yang multi-dimensi roboh dan terkulai dengan masuknya Injil, berita keselamatan itu. Koinonia atau Polis itu ada dan hidup dengan ciri kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan kesejahteraan yang konkret. Koinonia itu menjadi suatu percontohan (*exemplary*) yang mempersaksikan kehidupan individu yang bebas dan mandiri dengan solidaritas dan kehangatan kasih.

Politik bukanlah tujuan akhir, tetapi alat Tuhan bagi pembebasan manusia. Rumusan dan konsep etika politik adalah dalam kerangka pembebasan Tuhan terhadap kaum tertindas dan lemah menuju keselamatan yang seutuhnya, sepenuhnya, seluruhnya dan selamanya di dalam Kristus. Etika Politik Kristen dengan sendirinya tidak mungkin lepas dari persoalan penderitaan manusia yang dilanda pelbagai bentuk ketidakadilan sosial-ekonomi dan politik.¹²

Masalah penindasan dari kekuasaan dan penyalahgunaan fungsi politik selalu terjadi setiap masa. Masalah ini belum akan berakhir selama masih banyak penguasa politik belum menyadari sikap dan tindakan mereka yang tidak sesuai dengan fungsinya. Tidak banyak politisi yang sebelumnya memiliki tujuan baik untuk kepentingan masyarakat namun setelah ia menduduki jabatan tertentu di tingkat yang lebih tinggi tidak menutup kemungkinan lupa dengan tujuan semula.

Melihat masalah tersebut maka sangat penting gereja melibatkan diri dalam politik dengan tujuan untuk mengingatkan para politisi, membebaskan masyarakat yang tidak mendapatkan hak secara adil juga mendidik masyarakat agar tidak dibodohi oleh politisi yang memiliki tujuan destruktif. Kekristenan harus melek politik, memiliki *sense of politic*, tapi dalam koridor alkitabiah.

KESIMPULAN

Mengacu kepada pandangan politik Alkitab bahwa Gereja harus menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara menurut pandangan politik kitab Injil dan kitab Roma. Gereja bukan anti pluralistik dan mendukung kebebasan warganya berpolitik. Implikasi peran gereja secara nyata bahwa gereja secara individual dapat menjadi politikus, sedangkan gereja secara institusional tidak berpolitik praktis. Namun gereja tetap aktif menjalankan fungsi sosial kontrol melakukan “suara kenabian” di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Dan politik kekristenan harus berbaju kasih dan berbadan kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkitab Terjemahan Baru*, Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), 2016.
Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Penumpang Gelap: Warga Gereja, Warga Bangsa* (Jakarta: Biro Penelitian dan Komunikasi PGI & BPK Gunung Mulia, 2009).
Bambang Subandrijo dan Tim, *Agama dalam praksis*, (Jakarta, BPK.Gunung Mulia, 2003).
Eddy Kristiyanto, *Sakramen Politik: Mempertanggungjawabkan Memoria* (Yogyakarta: Lamalera, 2008), xi., Ibid Isidorus Lilijawa, *Mengapa Takut berpolitik ?* (Yogyakarta, Yayasan Pustaka Nusatama, 2007).

¹² Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia*, (Jakarta, Gunung Mulia, 2000), 249-250.

_____ “*Kristianitas & Politik Global Suatu Tinjauan Atas Konstruksi Teologi-Politik Tokoh Tokoh Kristen Di Jerman Dan Lebanon,*” 14, dikutip dari *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019

Ngelow and Ngelow, “*Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia.*”

Paulinus Yan Olla, *Spiritualitas Politik: Kesucian Politik Dalam Perspektif Kristiani* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia*, (Jakarta, Gunung Mulia, 2000).

<https://www.icc-melbourne.org/icc-blog/post/iman-kristen-dan-politik>

Hedi Sasrawan, <http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2015/01/asalmula-politik-artikel-lengkap.html>.